

---

# Pengamanan dan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur

---

# Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

# —

# Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2016 Tentang Sistem Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur



# Prinsip SPBE

- Efektifitas
- Keterpaduan
- Kestinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas dan
- Keamanan



# Ruang Lingkup SPBE

- Tata Kelola
- Manajemen
- Audit TIK
- Penyelenggara
- Percepatan
- Pemantauan dan Evaluasi

# Index SPBE Jawa Timur

1. Tahun 2018 = 2,92 (Baik)
2. Tahun 2019 = 3,1 (Sangat Baik)
3. Tahun 2020 = 3,4 (Sangat Baik)
4. Tahun 2021 = 2,83 (Baik)



## Tip

Turun karena 8 Area Manajemen yang belum dilaksanakan yaitu

1. Manajemen Risiko,
2. Keamanan Informasi,
3. Data,
4. Aset TIK,
5. Sumber Daya Manusia,
6. Pengetahuan,
7. Perubahan, dan
8. Layanan

# JDIH dalam SPBE

- Domain 4:  
Domain Layanan SPBE
- Aspek 8:  
Layanan Publik Berbasis Elektronik
- Indikator 44:  
Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- Nilai 2021 = **4 (sudah terintegrasi)**
- Tahun 2022 dilakukan evaluasi dan diharapkan nilainya menjadi **5 (dilakukan evaluasi)**

# Aplikasi JDIH [dokumjdih.jatimprov.go.id]

The screenshot shows the web interface of the JDIH (Jawa Timur Integrated Document and Information System) application. The browser address bar displays <https://dokumjdih.jatimprov.go.id>. The header includes the logo of the Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim and the text "Website JDIH".

The main content area is divided into three horizontal sections, each representing a different level of government:

- Produk Hukum Provinsi Jawa Timur:** This section features a search bar with the placeholder "Cari Peraturan". Below it, a notification banner reads "Notifikasi Update Produk Hukum JDIH". A list of regulations is displayed, including:
  - Peraturan Gubernur (PERGUB): PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU MANGU HARJO PROVINSI JAWA TIMUR
  - Peraturan Daerah (PERDA): PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024
  - Peraturan Daerah (PERDA): PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK KEPKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA
  - Peraturan Gubernur (PERGUB): PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
  - Peraturan Gubernur (PERGUB): PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
  - Peraturan Gubernur (PERGUB): PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
- Produk Hukum Pusat:** This section lists regulations from the central government, including Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, and Peraturan Menteri.
- Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kota:** This section lists regulations from various districts and cities, represented by their respective logos.

The footer of the page contains the text: "Copyright (©) 2016 Biro Hukum Provinsi Jawa Timur".

Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

### Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Tabel ini berisi beberapa data terkait Produk Hukum Daerah Kabupaten Kota :

 Kab. Bangkalan	 Kab. Banyuwangi	 Kab. Blitar	 Kab. Bojonegoro	 Kab. Bondowoso	 Kab. Gresik
 Kab. Jember	 Kab. Jombang	 Kab. Kediri	 Kab. Lamongan	 Kab. Lumajang	 Kab. Madiun
 Kab. Magetan	 Kab. Malang	 Kab. Mojokerto	 Kab. Nganjuk	 Kab. Ngawi	 Kab. Pacitan
 Kab. Pamekasan	 Kab. Pasuruan	 Kab. Ponorogo	 Kab. Probolinggo	 Kab. Sampang	 Kab. Sidoarjo
 Kab. Situbondo	 Kab. Sumenep	 Kab. Trenggalek	 Kab. Tuban	 Kab. Tulungagung	 Kota Batu
 Kota Blitar	 Kota Kediri	 Kota Madiun	 Kota Malang	 Kota Mojokerto	 Kota Pasuruan

TENTANG PEMBERKUAN PEMBATAAN KEHATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA TIMUR

**Keputusan Gubernur (KEPUB)**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/73/KPTS/013/2022 TENTANG PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2022






**Peraturan Gubernur (PERGUB)**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

## Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2021

Berikut ini adalah macam - macam judul peraturan terkait Peraturan Gubernur (PERGUB) 2021

Show 10 entries

Search:

NO	TAHUN	JUDUL PERATURAN	STATUS	INFORMASI
1	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	Berlaku	 
2	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Berlaku	 
3	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DI LINGKUNGAN PMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	Berlaku	 
5	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU JEMBER	Berlaku	 
6	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH	Berlaku	 
7	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	Berlaku	 
8	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	Berlaku	 
9	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	Berlaku	 
10	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU	Dicabut	 
11	2021	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	Berlaku	 

[Kembali](#)

JDIH Jawa Timur sudah  
**TERINTEGRASI**  
Dengan JDIH Kabupaten  
/ Kota dan Pusat



Aplikasi JDIH Jawa Timur  
ada di server Dinas  
Kominfo dan sudah  
dilengkapi beberapa lapis  
**PENGAMANAN**



CDN

DDoS Protection dan Web  
Application Firewall



Filter dan Blok IP  
mencurigakan

Firewall Diskominfo



ModSec (Keamanan)  
dari server hosting

Server Hosting

# —

## Metode Pengamanan

- Menggunakan DDoS Protection yang ada di CDN (Content Delivery Network)
- Menggunakan Web Application Firewall (WAF) untuk memfilter request
- Melakukan blok / memfilter akses dari IP yang mencurigakan oleh Firewall
- Memanfaatkan ModSecurity yang ada di Hosting

---

# Apakah menjamin?

Perlu dilakukan pengamanan di sisi **Aplikasi** juga!

---

# Metode Pengamanan (Sisi Aplikasi)

- Membatasi akses ke direktori server
- Menambahkan captcha pada formulir
- Membatasi hanya menggunakan password yang kuat
- Menutup tampilan *debugging* di server *production*

## Tip

Tetap **tidak dapat** menjamin keamanan 100%

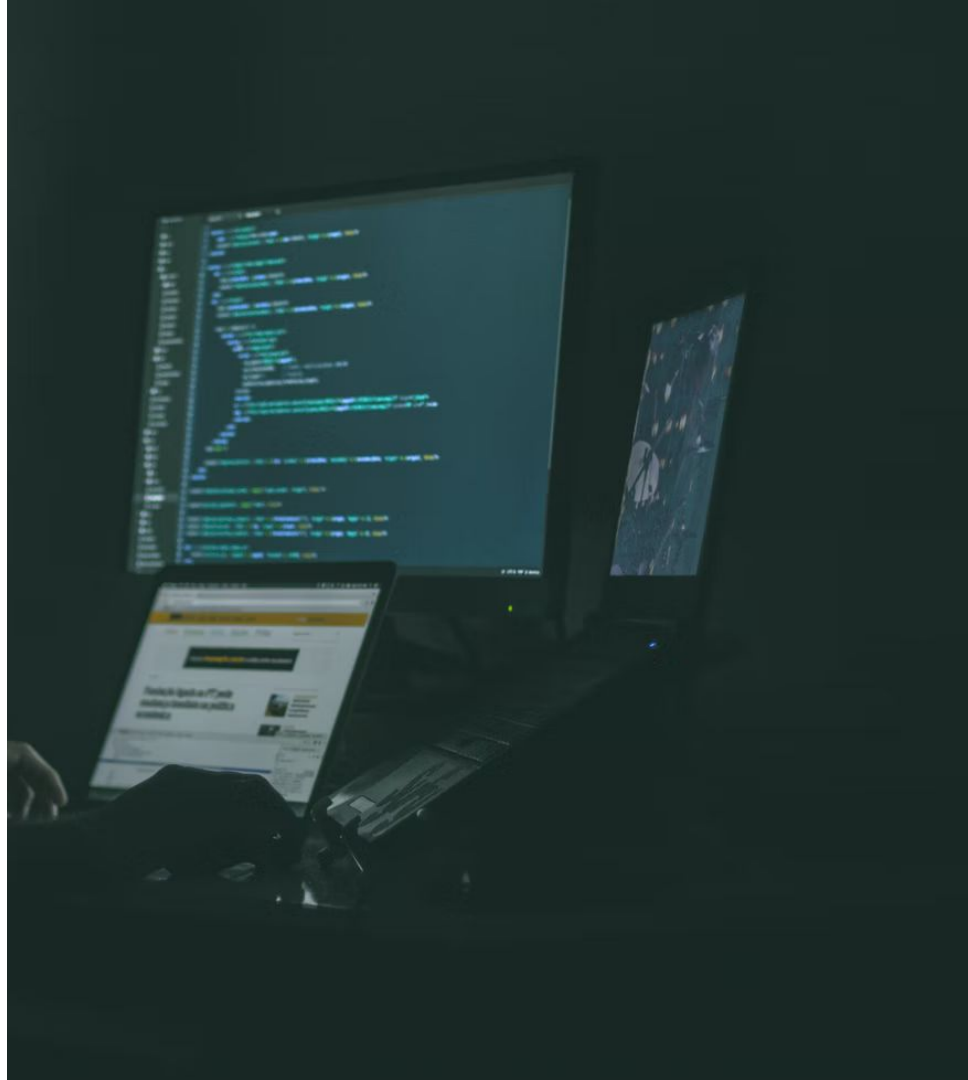
# Hasil Audit Aplikasi JDIH (2021)

No.	Proses	Nilai
1.	Perencanaan Pengembangan Aplikasi	100,00
2.	Analisa Kebutuhan Pengguna	60,00
3.	Analisa Kebutuhan Sistem Aplikasi	60,00
4.	Perancangan Sistem Aplikasi	7,14
5.	Pemrograman Sistem Aplikasi	66,67
<b>6.</b>	<b>Pengujian Sistem Aplikasi</b>	<b>0,00</b>
7.	Implementasi Sistem Aplikasi	26,67
8.	Pasca Implementasi Sistem Aplikasi	100,00
Nilai Rata-Rata		<b>52,56</b>

Dapat mengajukan

# Penetration Test

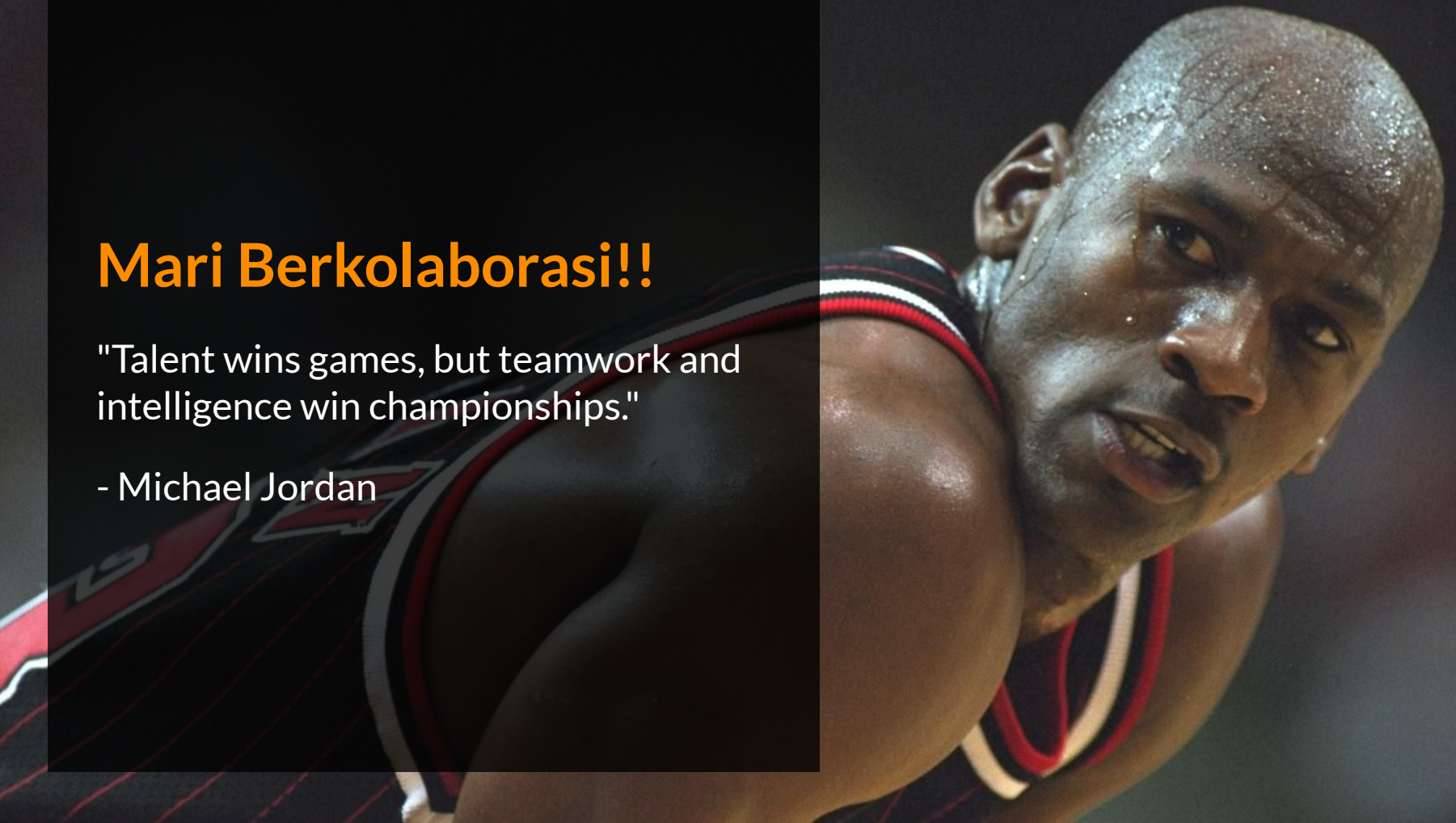
ke Dinas Kominfo untuk  
menguji keamanan aplikasi



## Mari Berkolaborasi!!

"Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships."

- Michael Jordan





# Terima Kasih

- [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id)
- Jl. A. Yani 242-244 Surabaya
- (031) 8294608
- [kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id)